

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU

Riau Sujarwani<sup>1</sup>, Fitri Dewi Wulandari<sup>2</sup>, Alfi Husni<sup>3 4</sup>, Faizal Rianto<sup>5</sup>, Sarinah<sup>6</sup>

Submitted Article: 22 February 2018

Reviewed Article: 20 April 2018

Accepted Article: 13 June 2018

### Abstract

One of the government empowerment programs is the Remote Indigenous Community Empowerment Program. Tajur Biru in Lingga Regency is a village that has many remote tribes, namely the sea tribe or sea gypsies, the phenomenon that occurs is the limited public services such as roads, lighting, posyandu, and unreachable social services has made Tajur Biru as the target of Remote Indigenous Community Empowerment Program. The purpose of this research is basically to describe the proper model of empowerment and to find obstacles in the empowerment of s Remote Indigenous Community Empowerment Program by Lingga Regency in Tajur Biru. Based on the results of the research, it can be concluded that the Remote Indigenous Community Empowerment Program has not been able to empower these communities. The obstacles that occurred is that the government as a local institution only provides guidance, training, and understanding on the empowerment of Remote Indigenous Communities, but the infrastructure facilities have not been well equipped such as educational infrastructure facilities, places of worship, and health services. The suggestions that can be submitted are as follows: provision of supporting infrastructure, educational facilities such as schools should established for children from remote indigenous communities, and changing the nomadic life pattern with a permanent residence program.

**Keywords:** Community Evelopment, Remote Indigenous Community

### Abstrak

Salah satu program pemberdayaan dari pemerintah adalah Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Desa Tajur Biru Kabupaten Lingga merupakan desa yang memiliki banyak suku terdalam yaitu suku laut, fenomena yang terjadi adalah terbatasnya pelayanan umum seperti sarana jalan, penerangan, posyandu, dan pelayanan sosial menjadikan Desa Tajur Biru sebagai sasaran Program Komunitas Adat Terpencil. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mendeskripsikan model

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Raja Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Raja Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Ilmu Sosiologi, STISIPOL Raja Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

<sup>4</sup> Korespondensi: Email: [alfi.husni86@gmail.com](mailto:alfi.husni86@gmail.com)

<sup>5</sup> Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Raja Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

<sup>6</sup> Mahasiswa Jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Raja Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

pemberdayaan yang tepat dan menemukan kendala-kendala dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil oleh Pemerintah Kabupaten Lingga pada Desa Tajur Biru. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil belum mampu memberdayakan masyarakat komunitas adat terpencil tersebut. Kendala yang terjadi adalah selama ini pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan, dan pemahaman terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, namun sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: penyediaan sarana prasarana pendukung, fasilitas pendidikan seperti sekolah yang didirikan bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, dan merubah pola hidup nomaden dengan program tempat tinggal tetap.

**Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas Adat Terpencil**

## **A. PENDAHULUAN**

**P**emberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang secara mandiri dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan nya. Oleh sebab itu, pemberdayaan yang dilaksanakan perlu diarahkan dengan memperhatikan segala aspek kehidupan terutama perekonomian rakyat, terutama yang berada di daerah, meliputi wilayah kecamatan maupun pedesaan. Masalah kemiskinan memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi artinya sulitnya mendapatkan uang untuk hidup sehari-hari karena faktor keterbatasan ruang pekerjaan, kesempatan pekerjaan serta pendidikan. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil untuk penanggulangan kemiskinan ditawarkan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (untuk selanjutnya disingkat PKAT). Program PKAT merupakan komitmen pemerintah meliputi pembangunan sarana jalan, sekolah, pemukiman, dan pengembangan sumber daya manusia dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan.

Umumnya mereka berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dimana jalan menuju desa hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan berjalankaki. Program PKAT merupakan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Menurut Departemen Sosial permasalahan KAT sesungguhnya berawal pada satu persoalan karena kondisi keterasingan sehingga komunitas mengalami hambatan untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Departemen sosial melalui program PKAT mengkhususkan untuk memberdayakan mereka secara

bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk ikut dalam proses pembangunan. Dalam konteks PKAT, yang menjadi fokus perhatian adalah yang berada di daerah terpencil baik secara geografis, sosial budaya, ekonomi maupun politik. Kekhawatiran akibat dari keterpencilan tersebut menjadikan mereka terhambat perkembangannya dalam semua aspek kehidupan sebagai sebuah masyarakat yang berdampak semakin tertinggalnya mereka dari masyarakat lainnya yang telah mendapatkan akses pelayanan sosial dasar.

Pada Desa Tajur Biru, masih terdapat suku laut yang menjadi bagian dari komunitas adat terpencil. Suku Laut pada akhirnya berada pada bagian paling luar dari keturunan asli Melayu. Merasa diri sebagai orang Melayu, suku Laut mengusung pola patrilineal atau garis keturunan ayah sebagai pola kekerabatan. Mereka hidup di lautan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat suku Laut adalah nelayan. Hampir semua orang di suku Laut melakukan aktivitas yang berkaitan dengan laut, baik nelayan, memancing, dan lainnya. Bahkan kebiasaan warga suku Laut pada malam hari adalah memancing. Warga suku Laut mempercayai bahwa memancing pada tengah malam akan mendapatkan ikan lebih mudah, mereka memancing hanya menggunakan perahu sederhana dan tombak. Jika mereka tidak mendapatkan ikan mereka tidak boleh pulang dan terpaksa harus tidur dalam perahu. Suku Laut adalah suku yang sulit berakulturasi (merubah kebudayaannya), sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan adalah apa yang mereka pelajari di laut. Saat pemerintah mencoba memasukan pendidikan pada anak suku Laut, ini menjadi kerja keras para pengajar. Pasalnya sikap yang terbentuk di suku Laut menjadi hal yang pertama kali mesti dibenahi, baru kemudian berhitung dan lainnya. Kemudian kesejahteraan mereka pun harus menjadi perhatian pemerintah, karena suku laut yang ada di

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Tajur Biru lebih memilih mengisolasi diri daripada ikut bersosialisasi dengan masyarakat Desa Tajur Biru.

Kegiatan program PKAT yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan program seperti beasiswa bagimasyarakat tidak mampu melalui program Bantuan Operasional Sekolah. Walaupun demikian angka putus sekolah masih tinggi karena kurangnya minat masyarakat khususnya bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan sekolah dasar untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan menengah atas. Hal ini terjadi karena banyak faktor, mulai dari tidak adanya dukungan orang tua, banyak masyarakat terpencil yang tidak memahami tentang pendidikan, sebagian besar dari mereka memilih untuk bekerja daripada kembali belajar. Kemudian permasalahan di Desa Tajur Biru ini adalah transportasi yang sulit, karena sarana prasarana pendidikan kurang memadai. Bahkan untuk jenjang SMP dan SMA tidak ada sekolah di daerah ini bagi anak desa Desa Tajur Biru yang ingin bersekolah harus menyebrang ke pulau seberang.

## B. KONSEP TEORI

### a. Pemberdayaan Masyarakat

**M**asyarakat memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera dengan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang cukup sehingga terlepas dari kesusahan dan kemiskinan agar dapat hidup lebih layak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya Simon (Hikmat 2006:11) mengemukakan bahwa Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pember

dayaan merupakan system yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemarkarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan dan kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan tindakan memandirikan masyarakat agar dapat memperbaiki serta menentukan masa depan kehidupannya sesuai keinginan. Melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki, seperti pengetahuan, modal, gagasan, dan keterampilan. Operasional dari konsep pemberdayaan pada umumnya lebih difokuskan pada level komunitas.

**b. Kemiskinan**

Konsep kemiskinan menurut (Roesmidi & Risyanti, 2006:95-96) adalah: "paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan, antara lain: (1) kemiskinan absolut, dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret dimana ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat seperti sandang, pangan dan papan; (2) kemiskinan relatif, yang dirumuskan berdasarkan 'the idea of relative standard', yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda dengan waktu yang lain; (3) kemiskinan subyektif, dimana dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri".

**C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah penelitian deskriptif, dimana pada penelitian ini menjelaskan tentang gambaran bagaimana

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

keadaan pemberdayaan pada PKAT di desa Tajur Biru.

**a. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tajur Biru yang berjumlah 499 kepala keluarga, Kemudian unsur pemerintah seperti pihak Dinas Sosial, Kepala Desa, 1 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 1 orang pemuka masyarakat yang ada di Desa Tajur Biru.

**b. Sampel**

Mengingat jumlah populasi yang besar, maka dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Maksudnya ialah sampel yang diambil masyarakat yang merasakan adanya program pemberdayaan ini yang diambil berjumlah 5 (lima) orang, yakni diantaranya 2 (dua) orang masyarakat komunitas adat terpencil yang sudah terbuka dengan masyarakat luar dan mampu berkomunikasi dengan baik serta memahami permasalahan berkaitan dengan pemberdayaan komunitas adat terpencil, 1 (satu) Kepala desa, 1 (satu) LSM, PKK/KUBE, dan 1 (satu) pegawai Dinas sosial bidang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga selaku pelaksana dari program Komunitas Adat Terpencil tersebut.

**D. PEMBAHASAN**

**a. Gambaran Umum Komunitas Adat Terpencil**

Pekerjaan masyarakat desa Tajur Biru di dominasi oleh nelayan namun berbagai bidang pekerjaan lainnya seperti yang dilihat pada tabel juga banyak dipilih oleh warga desa Tajur Biru sebagai pekerjaan mereka untuk dapat bertahan hidup. Suku Laut (Komunitas Adat Terpencil) Menguak tapak sejarah Suku Laut (the Sea People) yang berdomisili di perairan Provinsi Kepulauan Riau, dapat dipotret dari studi literatur yang

memperkirakan mereka telah eksis dan mengembara semenjak di akhir tahun 1300 M dan kemudian mereka memenuhi pulau-pulau di sekitar Kepulauan Riau semenjak awal 231 M. Suku Laut dalam terminologi lokal disebut "Orang Tambus" dalam literatur ethnografi pula sebagai Orang Selat (*Strait People*).

Banyak hasil riset yang menyimpulkan bahwa mereka adalah cikal bakal orang asli Melayu (*indigenous tribe*) yang bahkan telah mengembara antara tahun 2500-1500 SM yakni titik pertemuan antara kebudayaan Neolithicum yakni zaman Batu Baru (*New Stone Era*) ke abad Megalithicum yakni peradaban Batu Besar (*the Age of Big Stone-Civilization*). Melihat sejarahnya orang suku laut yang pertama kali yang bermukim di desa Tajur Biru adalah Tok Lang/Soleh bersama istrinya yang bernama Petai yakni pada Tahun 1960-an mereka datang dari Selat Panjang sampai saat ini hingga beranak cucu, dulunya mereka tidak terdaftar sebagai penduduk desa Tajur Biru bahkan tidak memiliki agama dan kartu identitas mereka merupakan warga yang liar tidak mau patuh kepada Negara. Diantara mereka ada yang tetap tinggal di hutan pedalaman Malaysia, ada yang menyeberang ke Pulau Sumatera yang akhirnya melahirkan suku Sakai dan Talang Mamak (di Riau) dan Suku Kubu atau Anak Dalam di Jambi. Sopher (1977) mencatat dalam kelompok kecil Proto-Malay/Suku Asli ini melarikan dan Hidup menelusuri pantai, selat dan laut yang akhirnya melahirkan Suku Laut dan Orang Selat. Ketakutan untuk kembali ke darat menjadikan mereka pengembara laut (*the sea nomads*) yang oleh Pearson (1956) menamakan Orang Gipsy Laut (*the Sea Gypsies*). Saudara se etnik Melayu lokal inilah yang saat ini bermukim dan mengembara disekitar pulau-pulau Jemaja, Siantan, Tambelan, Serasan, Midai, Bunguran, Kundur, Moro, Bertam, Lingke, Singkep dan Senayang. Meskipun pulau-pulau tersebut juga dihuni orang-

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

orang melayu, namun kita masih dapat membedakan antara Suku Laut/Proto Malay, dengan Suku Melayu lainnya (*traditional/ Modern Malay*).

Dalam strata sosial, kaum asli melayu ini termarginalisasi karena adanya berbagai kondisi yang menyebabkan mereka menjadi tertutup. Faktor internal misalnya berkembang adanya rasa rendah diri (*sense of inferiority complex*), tumbuhnya budaya kemiskinan (*the culture of poverty*) yang transgenerasional. Mereka miskin karena memang miskin (*the poverty of culture*). Sedangkan kondisi eksternal berkaitan dengan lingkaran serta kemiskinan dan keterpinggiran (*the vicious circles of poverty and marginalization*) adalah ketidakmampuan pemerintah membuat suatu pola pengentasan kemiskinan yang terstruktur dan berkesinambungan. Hal ini diperparah dengan sisi miring cara pandang sekelompok masyarakat terhadap nenek moyang Melayu yang masih eksis ini. Suku laut adakalanya lebih ditempatkan sebagai objek pengalokasian suatu proyek jangka pendek. Di sisi lain, berbagai organisasi sosial yang kelihatannya konsen tentang perbaikan nasib mereka lebih memfokuskan mencari dana bukan membina hingga tuntas mandiri. Banyak kegiatan yang bersifat bantuan menjadikan mereka pemalas berbudaya Fatalism. Kegiatan dalam bentuk langsung memang diperlukan tetapi harus bersifat pemberdayaan dan bukan pemberian sumbangan. Sumbangan baik dalam bentuk donasi, pakaian dan natura lainnya, menjadikan mereka mengalami sindrom budaya menerima dan berharap, bukan berbudaya berusaha dan sigap.

Marginalisasi Suku Laut diperparah dengan cara pandang sosial yang cenderung menyisihkan mereka dalam tatanan pergaulan sosial yang luas di tingkat kampung atau pulau bahkan lagi di perkotaan. Secara struktural, prasangka kelembagaan (*insitutional prejudices*) tidak terelakkan karena kesalahan memotret

mereka sebagai akibat tidak mengenali mereka secara etnis-empiris. (Sumber: Demografi Kantor Desa Tajur Biru, 2014)

Oleh karenanya berbagai upaya telah dirintis oleh pemerintah untuk dapat memberdayakan masyarakat suku laut khususnya di daerah desa Tajur Biru melalui serangkaian program, dan penelitian ini berusaha menggambarkan program yang dijalankan oleh masyarakat tersebut untuk dapat ditemukan model yang paling tepat untuk memberdayakan mereka.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga (Studi Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang)**

Suatu pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan, hal yang pertama yang perlu dijadikan landasan filosofinya ialah bahwa pembangunan itu harus menguntungkan semua pihak: rakyat, pemerintah, dan para stakeholder. Dengan pijakan filosofi seperti itu maka semangat untuk saling mendialogkan berbagai hal, menyangkut rancangan-rancangan, proses, dan keterlibatan masing-masing pihak menjadi jelas dan terukur. Terlebih dari itu, adalah akan terbentuknya tindakan kolektif yang bisa saling memberi makna. Komunitas adat terpencil menjalani kehidupan yang cukup memprihatinkan karena mendiami tempat-tempat terpencil yang secara geografis sulit dijangkau. Keterpencilan ini juga menyebabkan komunitas adat terpencil tidak mampu menjadi bagian dari proses pembangunan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Dibutuhkan pembangunan berkelanjutan terhadap segala aspek kehidupan dan penghidupan mereka demi meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil.

Program PKAT diarahkan pada upaya pengembangan kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

wajar dan layak seperti terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, sehingga mampu menanggapi berbagai perubahan dalam hidup bermasyarakat. Keterbatasan sarana jalan, alat transportasi, belum adanya sekolah dasar, posyandu, sistem penerangan, ladang berpindah dan sanitasi lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Sehubungan dengan itu, kajian pengembangan masyarakat difokuskan pada penanggulangan kemiskinan berorientasi pemberdayaan melalui program PKAT. Untuk mengetahui tentang pemberdayaan PKAT tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan sebagai berikut:

#### **1. Reorientasi**

Pada dasarnya pemberdayaan mengandung unsur pemberian kewenangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat termasuk masyarakat di Desa Tajur Biru. Reorientasi dilihat sebagai bagian dari proses bekerja sambil belajar dan menyangkut seluruh orang-orang yang berkepentingan, hal ini merupakan peninjauan kembali terhadap penyamaan nilai tentang pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan kehidupan serta pengetahuan tentang program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah lewat pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Hal ini dapat dilihat dari indikator:

##### *a. Adanya sosialisasi*

Sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Sosial tentang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dan tujuan dari program ini. Salah satu diantara sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur desa, kecamatan maupun pihak dinas adalah sosialisasi program-program pengentasan kemiskinan yang berhubungan dengan program PKAT tersebut. Dari wawancara yang dilakukan dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sudah

dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan dengan meninjau langsung para suku laut untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, seperti dilakukan sosialisasi mengenai bantuan rumah tidak layak huni, dan bantuan keluarga harapan, tidak hanya itu dari observasi yang dilakukan pernah dilakukan sosialisasi mengenai adanya bantuan beasiswa bagi anak suku laut agar mereka tidak lagi putus sekolah. Dalam sebulan minimal sekali dilakukan sosialisasi lewat kegiatan yang sedang dilakukan masyarakat di Desa Tajur Biru. Sosialisasi sangat diperlukan untuk memperkenalkan adanya program pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Sosialisasi sangat dibutuhkan bagi sebuah kebijakan maupun program baru agar dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Begitu juga dengan program pemberdayaan komunitas adat terpencil yang sebenarnya keberadaannya sudah sangat baik. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dianalisa bahwa sosialisasi sudah dilakukan. Keterpencilan menjadi faktor penyebab terbesar mengapa komunitas adat terpencil belum mampu mengambil bagian dalam proses pembangunan dan mengalami ketertinggalan. Mereka belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Program ini sebenarnya sudah di sosialisasikan hanya saja memang tidak mudah untuk menyentuk masyarakat suku laut ini. Kendala yang menjadi faktor utama adalah masih banyak suku laut yang sulit menerima perubahan sehingga tetap memilih untuk tinggal di laut.

Karena banyak kendala dan keterbatasan tersebut sehingga target awal yang sempat ditetapkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik, dan sampai saat ini masih belum optimal. Kegiatan sosialisasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Lintas Kementerian tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi

dan sharing program/kegiatan Lintas Kementerian dengan carameninjau langsung ke Lokasi PKAT untuk melihat keadaan dan masalah yang sebenarnya. Komunitas adat terpencil menjalani kehidupan yang cukup memprihatinkan karena mendiami tempat-tempat terpencil yang secara geografis sulit dijangkau. Keterpencilan ini juga menyebabkan komunitas adat terpencil tidak mampu menjadi bagian dari proses pembangunan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Dibutuhkan pembangunan berkelanjutan terhadap segala aspek kehidupan dan penghidupan mereka demi meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil.

Berdasarkan hasil observasi maka diketahui bahwa reorientasi adalah membantu komunitas adat terpencil ini untuk merubah cara berfikirnya. Reorientasi dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada komunitas ini tentang program pemberdayaan yang dilaksanakan kemudian apa manfaat dan tujuannya. Di reorientasi ini pemerintah lebih melakukan sosialisasi dan transfer pengetahuan kepada komunitas ini. Beberapa masalah yang dialami oleh Komunitas Adat Terpencil yaitu adanya hambatan fungsi sosial, hambatan fisik, geografis, ilmu pengetahuan (karena kurang/terbatasnya informasi, hambatan keterampilan (mereka masih menggunakan teknologi sederhana/tradisional dan belum mengenal teknologi modern dan budi daya) serta keterpencilan terhadap akses/fasilitas pelayanan sosial dasar atau pelayanan publik lainnya. Belum lagi masalah globalisasi yang juga menjadi salah satu persoalan yang mempengaruhi eksistensi komunitas adat terpencil. Suatu kenyataan telah terjadinya lonjakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pesat. Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi ada pula

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

masyarakat yang sulit menerima atau bahkan menolaknya. Globalisasi tidak jarang memaksa perubahan perilaku masyarakat pada umumnya terkhusus bagi kelompok masyarakat komunitas adat terpencil. Adanya pengetahuan yang diberikan ke pada seluruh komponen masyarakat di Desa Tajur Biru lewat kegiatan-kegiatan seperti pertemuan masyarakat dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunitas Adat Terpencil sebagai warga bangsa perlu diberdayakan agar mereka mampu menjalani kehidupan sebagai warga bangsa pada umumnya. Pemberdayaan yang dilaksanakan tentunya perlu memperhatikan kondisi sosialbudaya khas mereka yang pada umumnya masih diliputi oleh nilai dan normayang berdasarkan adat.

Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang salah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk salah paham akan menjadi besar. Maka dari itu dibutuhkan transfer pemahaman terhadap apa itu program pemberdayaan komunitas adat terpencil, apa tujuannya dan apa manfaatnya.

Bentuk pengetahuan yang pemerintah berikan biasanya ceramah, maupun sosialisasi secara tidak langsung. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, membutuhkan adanya pemahaman standar dan tujuan kebijakan dari masing-masing individu yang bertanggung jawab melaksanakan. Oleh karena itu standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar tidak menimbulkan distorsi implementasi. Jika standart dan tujuan tidak

diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup dimensi.

Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat diketahui bahwa pemerintah sudah mengupayakan agar program pemberdayaan komunitas adat terpencil dapat diketahui oleh masyarakat. Agar lebih mudah untuk memperkenalkannya maka pemerintah melakukan kegiatan khusus untuk menyampaikan tentang program pemberdayaan komunitas adat terpencil baik fungsi, tujuan maupun dasar hukumnya. Kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika mereka tidak jelas, maka mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dengan adanya program pemberdayaan komunitas adat terpencil belum sepenuhnya mampu merubah cara berfikir komunitas ini, walaupun sudah adanya pengetahuan yang diberikan kepada seluruh komponen masyarakat di Desa Tajur Biru lewat kegiatan-kegiatan seperti pertemuan masyarakat, ibu-ibu pengajian, dan kegiatan gotong royong dan hal ini dianggap belum dapat menyentuh seluruh komunitas adat terpencil yang ada di Desa Tajur Biru.



*b. Gerakan sosial*

Penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara meluas telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penguatan masyarakat seperti keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tersebut. Kemunculan gerakan dari masyarakat mulai dari kesadaran para ibu-ibu PKK kemudian sebagian masyarakat membentuk sebuah lembaga sosial khusus untuk memajukan program tersebut hal ini menguatkan kewenangan masyarakat lokal dalam pembangunan. Salah satu yang ikut dalam gerakan ini selain ibu-ibu adalah para pemuda, mereka mengupayakan bantuan dari luar termasuk bantuan pendirian gereja, agar masyarakat suku laut dapat beribadah dengan benar.

Masyarakat Desa Tajur Biru yang turut memajukan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan membentuk berbagai unit kelompok usaha bersama seperti koperasi simpan pinjam. Penyediaan sumber daya keuangan merupakan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat suku laut untuk dapat menggunakan dana sebagai modal untuk berusaha. Penyediaan sumber daya keuangan ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat suku laut yang mana dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat suku laut untuk mendapatkan modal yang bisa digunakan untuk membuat usaha. Berdasarkan pernyataan informan dapat diketahui bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang hanya memberikan bantuan berupa dana kepada masyarakat suku laut untuk selanjutnya dipergunakan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dalam bidang perikanan dan kelautan dan pihak pemerintah juga sudah mengarahkan masyarakat untuk membuat usaha dengan meminjam modal kepada Lembaga Keuangan Mitra yang nantinya

dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha di bidang perikanan dan kelautan. Jawaban senada juga dilontarkan oleh informan pegawai pelaksana dan pendamping yang senada mengatakan bahwa pihak Dinas hanya memberikan bantuan saja kalau untuk modal usaha yang lebih sudah diarahkan kepada pihak lembaga keuangan agar masyarakat dapat meminjam modal usahanya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa pemerintah telah menyediakan dana bantuan kepada masyarakat suku laut yang sangat membantu masyarakat untuk membuat usaha budidaya perikanan serta industri lainnya dan juga pihak dinas mengarahkan kepada masyarakat yang ingin membuat modal usaha dengan membutuhkan pinjaman kepada pihak koperasi yang mana masyarakat dapat melangsungkan kegiatan industri di bidang perikanan dan kelautan yang dapat membangun ekonomi masyarakat.

Adanya partisipasi masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan pihak LSM, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan kerjasamanya yang baik antar masyarakat Desa Tajur Biru. Dukungan terhadap adanya pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan hal yang harus diperhatikan demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu dukungan dalam hal ini dari seluruh komponen masyarakat, maupun LSM. Berjalannya sebuah kebijakan agar dapat efektif haruslah dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, dengan adanya kepedulian terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang sudah dibuat maka, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil akan memberikan dampak yang baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Dari jawaban kedua informan dapat diketahui

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

bahwa dukungan dari masyarakat sudah baik.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebenarnya adalah kebijakan pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam memberdayakan masyarakat komunitas adat terpencil memang tidak mudah, kadang apa yang menjadi tujuan dari program tidak mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat tersebut. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan komunitas terpencil ini, bentuk partisipasi bisa dengan cara bermacam-macam salah satunya mau menerima suku laut di wilayahnya, memberikan pengetahuan terhadap apa agama, dan norma-norma yang berlaku. Suatu pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan, hal yang pertama yang perlu dijadikan landasan filosofinya ialah bahwa pembangunan itu harus menguntungkan semua pihak: rakyat, pemerintah, dan para stakeholder. Dengan pijakan filosofi seperti itu maka spirit untuk saling mendialogkan berbagai hal, menyangkut rancangan-rancangan, proses, dan keterlibatan masing-masing pihak menjadi jelas dan terukur. Terlebih dari itu, adalah akan terbentuknya tindakan kolektif yang bisa saling memberi makna.

### *c. Institusi Lokal*

Institusi lokal berfungsi untuk memfasilitasi tindakan bersama yang sudah terpola sehingga fungsinya bukan semata sebagai suatu organisasi melainkan juga merupakan hubungan sosial yang terorganisir yang melaksanakan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Zamzami, 2015). Adanya peran pemerintah melalui komitmen dalam

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

menjalankan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil seperti menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi masyarakat, memberikan pendidikan serta pelatihan bagi masyarakat di Desa Tajur Biru. Institusi lokal berfungsi untuk memfasilitasi tindakan bersama yang sudah terpola sehingga fungsinya bukan semata sebagai suatu organisasi melainkan juga merupakan pranata sosial.

Dalam menjalankan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ini melibatkan banyak pihak, Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa selama ini pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan dan pemahaman terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, namun sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik. seperti sekolah dan layanan kesehatan. Masyarakat adat, termasuk di dalamnya KAT, adalah penduduk asli yang telah tinggal di Indonesia sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adat (terpencil) maupun oleh masyarakat adatnya sendiri dalam mempertahankan jati diri dan hak ulayatnya, sampai saat ini masih belum berhasil secara optimal dan memuaskan masing-masing pihak. Sementara itu, program pengembangan wilayah tertinggal yang ada selama ini lebih menekankan kepada aspek kemiskinan, keterpencilan dan keterisolasian wilayah. Masyarakat lokal sebagai target group kegiatan pengembangan wilayah dipilih berdasarkan kemampuan kelompok masyarakat tersebut dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha sehingga dapat "menyukseskan" proyek tersebut. Bahkan lebih buruk lagi, beberapa kasus dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah yang menggunakan dana pinjaman luar negeri, pemilihan masyarakat penerima bantuan (target group) didasarkan pada faktor kekerabatan dari aparat desa. Di lain

pihak banyak penduduk yang masuk dalam katagori komunitas adat yang tertinggal dan lokasinya cukup terisolir dan terpencil, tidak masuk dalam kelompok masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pemerintah turut mengawasi, lewat unit pelaksana tugas maupun lewat pendamping. Kemudian dalam hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa adanya peran pemerintah dan komitmen untuk menjalankan kebijakan ini bahwa komunitas adat terpencil yang selama ini dikenal dengan sebutan masyarakat terasing perlu dibina kesejahteraan sosialnya dengan memperdayakannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar komunitas adat terpencil yang bersangkutan dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan kemudian bahwa pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Tersedianya pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas ibadah, dan fasilitas umum lainnya yang diberikan pihak Desa kepada masyarakat. Suku Laut merupakan suatu etnis atau suku bangsa yang terdapat di wilayah Kepulauan Riau. Mereka hidup di atas perahu dan selalu berpindah-pindah tergantung kepada iklim dan musim, namun mereka juga membutuhkan perhatian untuk melengkapi sarana dan prasarana nya. Anak-anak Suku Laut banyak yang terpaksa mengalami putus sekolah karena tidak ada biaya. Banyak diantaranya yang bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, dan pada usia anak-anak harus bekerja layaknya orang dewasa. Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Kepulauan Riau tertinggi adalah di tingkat

Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 99.35 %. Pada tahun 2010 dan semakin menurun saat mencapai tingkat SMA. Sangat jarang kita melihat anak-anak Suku Laut yang berhasil membuka bisnis kecil-kecilan, menjadi guru maupun polisi. Menjadi Sarjana ataupun Pejabat Pemerintahan pun rasanya jauh dari angan. Pendidikan masyarakat suku laut suku laut masih sangat rendah, tidak banyak yang mengenyam pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas, kebanyakan warganya hanya lulusan sekolah dasar, setelah itu langsung ikut orang tuanya melaut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah diadakan upaya peningkatan SDM Suku Laut, Bantuan permodalan untuk membeli perahu atau pompong, dan konsentrasi pada pendidikan. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius bagi Pemerintah pusat dan juga Pemda. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa maka dapat dianalisa bahwa sarana prasarana sudah ada namun sangat minim dan perlu perbaikan terutama dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan. Masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.

Kemudian dalam wawancara diketahui bahwa sarana memang belum memadai dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Sekolah sebagai bentuk organisasi diartikan sebagai wadah dari kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan pendidikan. Masyarakat suku laut umumnya buta aksara (buta huruf). Hal ini disebabkan karena lokasi mereka yang terpencil dan medan yang sulit serta sarana transportasi

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

yang sukar di dapat untuk menjangkau lokasi pulau ini.

*d. Pengembangan kapasitas*

Pengembangan kapasitas masyarakat merupakan salah satu unsur utama proses pemberdayaan disamping pemberian kewenangan. *Dalam proses pengembangan kapasitas tersebut tidak menutup pintu bagi pihak eksternal seperti memberikan bantuan-bantuan dari luar.* Adanya perhatian seperti bantuan yang dari lembaga lain diluar pemerintahan yang peduli terhadap masyarakat di Desa Tajur Biru. Pengembangan kapasitas masyarakat merupakan salah satu unsur utama proses pemberdayaan disamping pemberian kewenangan. *Dalam proses pengembangan kapasitas tersebut tidak menutup pintu bagi pihak eksternal seperti memberikan bantuan-bantuan dari luar.*

Dari jawaban hasil wawancara dapat dianalisa bahwa untuk bantuan sarana maupun sarana sudah diberikan guna mensukseskan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hanya saja bantuan yang diberikan memiliki jenjang waktu tidak bisa sekaligus diberikan kepada suku laut. Dari hasil observasi penulis menemukan kebenaran dari pernyataan yang didapat dari wawancara diatas. Bahwa bantuan sudah ada Pemberdayaan ekonomi akan berhasil jika pemerintah juga melihat dan mengupayakan bantuan-bantuan kepada masyarakat dan memantau apa yang menjadi kebutuhan suku laut yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa bantuan sudah diberikan pemerintah hanya saja untuk bantuan di luar pemerintah hingga saat ini belum ada. Karena masih banyak orang yang belum mempercayai suku laut. Pemerintah mengunjungi komunitas adat terpencil Suku Laut di Provinsi Kepulauan Riau, untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat setempat sebesar Rp1,4 miliar. Menteri Sosial

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

memberikan bantuan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kondisi rumah warga Suku Laut yang dibangun diatas laut dengan bahan dasar dari kayu. Jembatan kayu atau pelantar kondisinya juga sudah keropos. Bantuan yang diserahkan adalah untuk rehabilitasi RTLH sebanyak 128 unit masing-masing Rp10 juta dan tiga unit sarana lingkungan berupa pelantar masing-masing sebesar Rp50 juta. Suku Laut adalah salah satu komunitas adat terpencil yang hidup dan beraktivitas di perahu atau sampan dan bermatapencaharian sebagai suku laut. Semula mereka tinggal di atas perahu namun saat ini Suku Laut di Desa Tajur Biru sebagian sudah tinggal di rumah yang berdiri di atas laut. Di Kepulauan Riau, ada lebih dari 100 pulau lain disamping pulau utama sehingga terjadi perbedaan baik dari segi kesejahteraan, infrastruktur dan lainnya.

Adanya pendamping dalam program pemberdayaan komunitas adat terpencil di Desa Tajur Biru Pendampingan ini di lakukan berupa pendampingan yang bersifat partisipatoris, yang terfokus pada pengembangan kreatifitas dan kemandirian masyarakat suku laut. Pengembangan kreatifitas ini berupa peningkatan skill dan kemampuan masyarakat, sehingga di harapkan dengan adanya kemampuan ini menjadi perantara kemakmuran masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkat kemampuan serta pengetahuan melalui sosialisasi maupun bimbingan teknis yang diberikan.

Berdasarkan pendapat informan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah selalu memberikan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat kemudian pihak Dinas selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan selalu menampung apa keluhan dan memberikan bantuan kepada masyarakat suku laut. Peningkatan kualitas

sumber daya manusia haruslah dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat suku laut yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak hanya mendapatkan sarana dan prasarana akan tetapi juga mendapatkan ilmu saja merupakan salah satu bentuk pemberdayaan pemerintah kepada masyarakat suku laut agar dapat bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

Menjadi seorang fasilitator harus memegang teguh tujuan utama, yaitu memberdayakan masyarakat bukan memperdaya masyarakat. Artinya butuh keiklasan penuh dalam proses pendampingan. Selain keiklasan ketekunan, kesabaran dan keberlanjutan merupakan pondasi yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat suku laut berdasarkan pernyataan informan dapat diketahui bahwa pihak pemerintah selalu memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis kepada masyarakat merupakan tahap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan serta mendapatkan pelajaran bagaimana untuk memelihara peralatan yang ada sebagai sarana penunjang pekerjaan. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui Dinas sosial sudah memberikan pendampingan. Pendampingan yaitu terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh masyarakat sendiri, jelas menunjukkan adanya proses inisiatif dan bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, tanpa adanya intervensi dari luar.

Adanya pengembangan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Tajur Biru. Pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil. Pembangunan ini hendaknya menyentuh segala aspek kehidupan dan penghidupan

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

agar terjadi peningkatan kesejahteraan sosial warga komunitas adat terpencil. Komunitas adat terpencil tidak terlepas dari adanya kearifan lokal yang membedakan kelompok masyarakat ini dengan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, persoalan globalisasi kembali memberikan sebuah tantangan berat bagi komunitas adat terpencil untuk tetap bertahan dengan sistem kearifan lokal mereka. Untuk mengetahui adanya pengembangan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tajur Biru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa program KAT ini memiliki pedoman khusus kegiatan yang harus dilaksanakan pemerintah bersama-sama dengan pemerintah desa dalam pemberdayaan. Namun sampai saat ini program yang dilakukan masih sama belum ada pengembangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa pengembangan sejauh ini belum dilakukan karena selama ini mereka masih menggunakan kegiatan yang sudah ada. Pemberdayaan merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan.

Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Program pemberdayaan komunitas adat terpencil menurut Rukminto (2003:31) merupakan program yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat dengan kategori terpencil. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, sehingga tercipta peningkatan mutu hidup, terlindungi hak dasarnya serta terpeliharanya budaya lokal. Program pemberdayaan ini juga membawa warga komunitas adat terpencil kepada peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih

baik dari kondisi yang sebelumnya. Program ini pada intinya meningkatkan kapasitas komunitas adat terpencil untuk memutuskan dan menentukan hari depannya.

## E. KESIMPULAN

**R**eorientasi diketahui bahwa sosialisasi sudah dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan dengan meninjau langsung para suku laut untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, seperti dilakukan sosialisasi mengenai bantuan rumah tidak layak huni, dan bantuan keluarga harapan. Namun komunitas adat terpencil yang ada di Desa Tajur biru belum bisa menerima sepenuhnya perubahan, karena mereka tetap memilih untuk tinggal di laut. Dalam sebulan minimal sekali dilakukan sosialisasi lewat kegiatan yang sedang dilakukan masyarakat di Desa Tajur Biru. Sosialisasi sangat diperlukan untuk memperkenalkan adanya program pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Gerakan sosial diketahui bahwa Pemerintah telah menyediakan dana bantuan kepada masyarakat suku laut yang sangat membantu masyarakat untuk membuat usaha budidaya perikanan serta industri lainnya dan juga pihak dinas kepada masyarakat yang ingin membuat modal usaha dengan membutuhkan pinjaman kepada pihak koperasi yang mana masyarakat dapat melangsungkan kegiatan industri di bidang perikanan dan kelautan yang dapat membangun ekonomi masyarakat, dan mendorong partisipasi

masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan komunitas terpencil ini, bentuk partisipasi bisa dengan cara bermacam-macam salah satunya mau menerima suku laut di wilayahnya, memberikan pengetahuan terhadap apa agama, dan norma-norma yang berlaku.

Institusi lokal diketahui bahwa peran pemerintah sejauh ini masih belum optimal karena pemerintah memfokuskan pada sosialisasi dan pengetahuan masyarakat komunitas adat terpencil terhadap program pemberdayaan, namun tidak diiringi dengan pembangunan sarana prasana serta fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

Kendala yang terjadi adalah selama ini pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan dan pemahaman terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, namun sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan.

## F. UCAPAN TERIMAKASIH

**A**rtikel ini merupakan hasil penelitian mandiri yang dilaksanakan oleh Dosen STISIPOL Raja Haji, khususnya Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Sosiologi. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu penelitian ini terlaksana.

## Daftar Pustaka

- Kusnadi. (2002). Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan Dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Penerbit: LkiS Yogyakarta.
- Meleong, Lexy. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Satria, Arif. (2002). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta : Cidesindo
- Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

- Soeharyo, Salamun, dan Nasri Effendi. (2001). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : LAN
- Syarief, Efrizal. (2008). Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Makasar : Bappenas
- Wrihantolo, Randy R & Dwijiwidjoto, Riant Nugroho. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta : Gramedia.
- Zamzami, L. (2015). Nelayan Tiku: Tradisi dan Kelembagaan Sosial Berdasarkan Budaya Masyarakat Lokal Berbasis Komunitas dalam Aktivitas Penangkapan Ikan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 17(1), 39–63.